

FINANCE

LAPORAN KINERJA BAGIAN KEUANGAN BIRO PKT TAHUN 2016



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Bagian Keuangan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Keuangan tahun 2016, sebagaimana diamanatkan dalam UU no 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara keseluruhan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Keuangan tahun 2016 merupakan sarana pelaporan kinerja dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang isinya berisi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Keuangan tahun 2016 merupakan media pertanggungjawaban kinerja atas komitmen dalam Penetapan Kinerja tahun 2016, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Government*.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Keuangan tahun 2016 ini masih jauh dari sempurna, baik secara kinerja maupun pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Bagian Keuangan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kinerja Bagian Keuangan, bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang semakin prima di Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha, khususnya Bagian Keuangan.

Jakarta, Januari 2017

Bagian Keuangan

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga menjadi kewajiban Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT), sebagai salah satu unit kerja di lingkungan BSN. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, Laporan Kinerja di lingkungan BSN telah disusun secara berjenjang. Mulai tahun 2016, seluruh Eselon III di masing-masing Unit Kerja Eselon II diminta untuk menyusun Laporan Kinerja Eselon III. Kinerja Bagian Keuangan-Biro PKT sebagai salah satu Eselon III di bawah Biro PKT memberikan kontribusi pada kinerja Biro PKT BSN. Oleh karena itu, pada Tahun 2016 Bagian Keuangan-Biro PKT mulai menyusun Laporan Kinerja Tahun 2016 yang merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro PKT BSN tahun 2016.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Bagian Keuangan-Biro PKT adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan

serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Biro PKT, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja

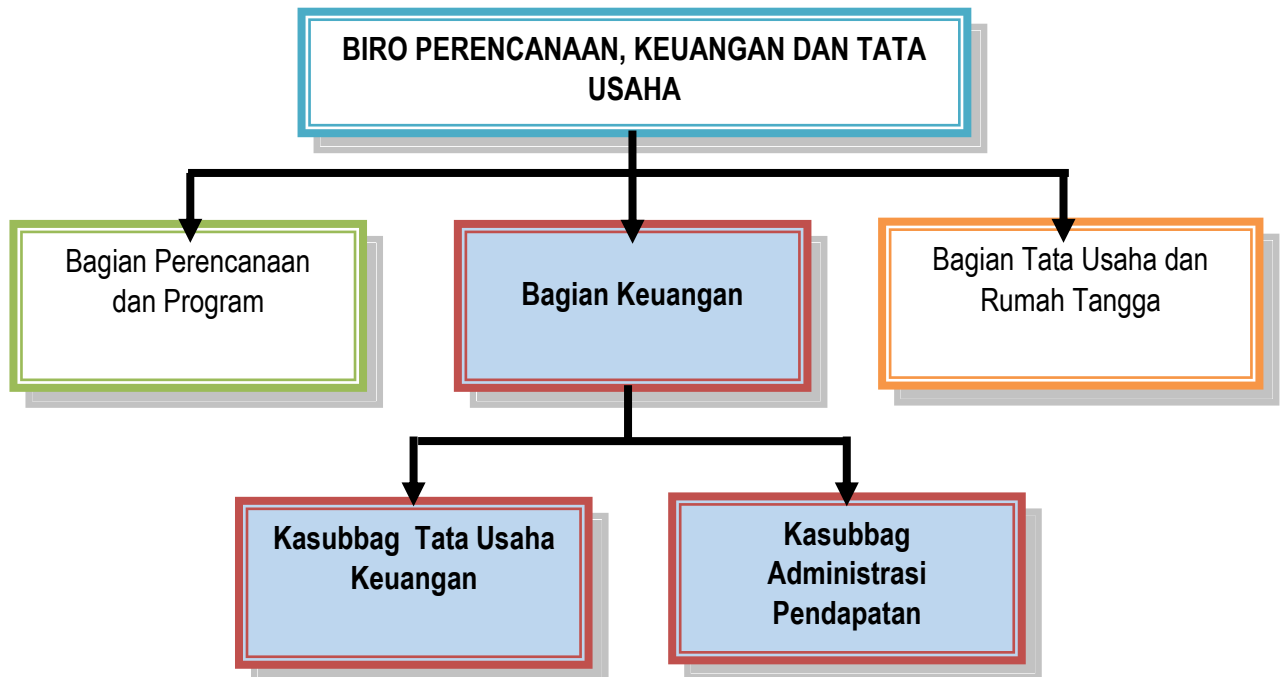
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Keuangan-Biro PKT adalah salah satu Eselon III di lingkungan Biro PKT BSN. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Bagian Keuangan-Biro PKT adalah melaksanakan urusan administrasi keuangan dan administrasi pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bagian Keuangan-Biro PKT menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
2. pelaksanaan urusan tata usaha pendapatan negara;
3. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan

Struktur Bagian Keuangan Biro-PKT



Gambar I.1
Struktur Organisasi Bagian Keuangan-Biro PKT

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Bagian Keuangan-Biro PKT mempunyai tata kerja yang didukung oleh 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

1. **Sub Bagian Tata Usaha Keuangan**, dengan tugas melakukan urusan administrasi keuangan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan keuangan.
2. **Sub Bagian Administrasi Pendapatan**, dengan tugas melakukan perencanaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran pendapatan serta penyusunan laporan pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2016 Bagian Keuangan-Biro PKT memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Unit Kerja	Unit Kerja	Unit Kerja
Kepala Bagian Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha Pendapatan
▶ Jenjang Pendidikan: S2	▶ Jenjang Pendidikan: >S1 - S1 - S2	▶ Jenjang Pendidikan: >S1 - S1
▶ Laki-laki	▶ >S1 : 10 S1 : 11 S2 : 1	▶ >S1 : 2 S1 : 1
▶ Usia : 45 tahun	▶ Laki-laki : 7 Perempuan : 11	▶ Laki-laki : 2 Perempuan : 1
▶ E-mail : agus_purnawarman@bsn.go.id	▶ Usia : 25 - 30 tahun	▶ Usia : 25 - 35 tahun
Laporan Kinerja Bagian Keuangan	Laporan Kinerja Bagian Keuangan	Laporan Kinerja Bagian Keuangan

PERAN STRATEGIS BAGIAN KEUANGAN-BIRO PKT

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Biro PKT sebagai unsur penunjang BSN mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu dengan menjalankan peran penganggaran, pengelola keuangan, urusan ketatausahaan dan penyediaan sarana prasarana. Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Bagian Keuangan-Biro PKT telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Potensi	Permasalahan	TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> •Pengelolaan keuangan tersentralisasi di Bagian Keuangan dengan sistem pengelolaan yang sesuai peraturan perundangan dan BSN hanya memiliki 1 (satu) satuan Kerja •Terdapat beberapa aplikasi keuangan yang mempermudah pengelolaan keuangan, termasuk Sistem Informasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran (SIPAKAR) 	<ul style="list-style-type: none"> •Tidak semua pejabat struktural yang memahami proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga pengawasan dan pengendalian masih kurang efektif •Masih terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan, khususnya di unit kerja teknis •Belum terintegrasinya aplikasi keuangan yang ada, sehingga belum optimal pemanfaatannya 	<ul style="list-style-type: none"> •Perlunya peningkatan pemahaman pejabat struktural melalui sosialisasi tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan secara periodik •Melakukan pelatihan/bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan kepada para pegawai yang ditugaskan dari unit kerja teknis, khususnya yang ditugaskan dalam pengelolaan keuangan •Melakukan integrasi aplikasi keuangan yang ada dengan bantuan pengembang aplikasi yang kompeten

PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN STRATEGIS

Visi dan Misi

Rumusan visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (PKT) sesuai Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI

“Menjamin pelayanan prima dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran dan tata usaha yang profesional, transparan dan akuntabel”

MISI

1. Memberikan dukungan layanan perencanaan, keuangan, dan tata usaha untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN.
2. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Biro PKT telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Biro PKT mulai tahun 2015 telah dilakukan penyempurnaan sebagai berikut :

TUJUAN

Tujuan sesuai Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019 :

1. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan dan rumah tangga
2. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang berkualitas
3. Meningkatnya kualitas penerapan e-gov dalam pelaksanaan Tusi PKT
4. Pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel
5. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja BSN
6. Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN

Hasil penyempurnaan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan dan rumah tangga
2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN

Sasaran ini merupakan sasaran strategis di lingkungan Biro PKT selaku unit yang memberikan layanan kepada unit teknis di lingkungan BSN. Biro PKT dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Biro PKT harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2016, sasaran Biro PKT telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan. Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019 :

1. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan dan rumah tangga
2. Terlaksananya pengelolaan anggaran yang berkualitas
3. Meningkatnya kualitas penerapan e-gov dalam pelaksanaan Tusi PKT
4. Pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel
5. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja BSN
6. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Biro PKT berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya *good governance* dan *clean government*
2. Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang akurat dan akuntabel
3. Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel
4. Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga
5. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana BSN

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKT yang profesional

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2016 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Biro PKT sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2016 juga mengalami perubahan. Berikut adalah perbandingan Perjanjian Kinerja Biro PKT tahun 2015 dan 2016 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target

Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2015

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2015
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi	1. Nilai evaluasi LAKIP (dokumen LAKIP)	B (predikat)
		2. Jumlah dokumen Renja	1 Dokumen
		3. Jumlah dokumen RKAKL	1 Dokumen
		4. Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	1 Dokumen
		5. Jumlah Laporan Monev Kegiatan	1 Laporan
		6. Jumlah pelaksanaan Raker	1 Kali
		7. Jumlah sosialisasi/ workshop perencanaan dan penganggaran	5 Kali
2.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan	8. Opini BPK atas Laporan Keuangan (laporan keuangan)	WTP (opini)
		9. Jumlah kebijakan pengelolaan anggaran	1 Kebijakan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2015
		10. Laporan pengelolaan anggaran dan PNBP	2 Laporan
		11. Jumlah konsep revisi PP tarif PNBP	1 Dokumen
		12. Jumlah sosialisasi PNBP	2 kali
3.	Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga	13. Jumlah laporan pengelolaan barang milik negara	1 Laporan
		14. Jumlah Laporan penghapusan BMN	1 Laporan
		15. Jumlah Laporan penetapan status BMN	1 Laporan
		16. Jumlah Laporan pengalihan status BMN	1 Laporan
		17. Jumlah kebijakan pengelolaan tata usaha dan rumah tangga	1 Kebijakan
4.	Tersedianya sarana dan prasarana fisik untuk pelaksanaan tupoksi I	18. Jumlah sarana dan prasarana yang dapat disediakan	762 unit
		19. Jumlah sosialisasi/ bimtek tata usaha dan rumah tangga	4 kali
		20. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung Lab SNSU	1 Dokumen

Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2016
Customer Perspectives			
1.	Terwujudnya good governance dan clean government	1. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	70 (BB) (nilai)
		2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP (opini)
		3. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan PKT	3,6 (nilai)
Internal Process Perspectives			
2.	Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang akurat dan akuntabel	4. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	5 Dokumen
		5. Persentase pengajuan anggaran BSN yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif	80 %
		6. Persentase penyusunan anggaran Unit Kerja yang telah Berbasis Kinerja	100 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2016
		7. Persentase Unit Kerja yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	50 %
		8. Jumlah revisi anggaran ke Kemenkeu	Maksimal 4 kali
		9. Persentase pelaporan kinerja dan anggaran tepat waktu	100 %
3.	Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel	10. Jumlah dokumen pengelolaan anggaran	7 Dokumen
		11. Persentase realisasi anggaran BSN	≥95 %
		12. Frekuensi perputaran Uang Persediaan dalam setahun	11 kali
		13. Persentase Rekonsiliasi ke KPPN yang sesuai dan tepat waktu	100 %
		14. Persentase Laporan Pertanggungjawaban bendahara tepat waktu	100 %
		15. Persentase realisasi target penerimaan PNBP	100 %
4.	Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga	16. Jumlah dokumen Tata Usaha dan Rumah Tangga	3 Dokumen
		17. Persentase BMN fisik yang dapat ditelusur	0 %
5.	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana BSN	18. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN	100 %
		19. Persentase pembangunan dan ketersediaan fasilitas Lab. Acuan (perencanaan, pembangunan, penyediaan fasilitas laboratorium)	40 %
		20. Persentase penyelesaian paket pekerjaan yang di lelang	100%
Learning and Growth Perspectives			
6.	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKT yang profesional	21. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PKT yang meningkat kompetensinya	100%
		22. Realisasi anggaran PKT	≥95 %
		23. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola PKT	4 Aplikasi

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro PKT menetapkan 6 (enam) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya. Keterkaitan Bagian Keuangan-Biro PKT dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2016 dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Keterkaitan Bagian Keuangan dengan
Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2016
Customer Perspectives			
1.	Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>	1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP (opini)
		3. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan PKT	3,6 (nilai)
Internal Process Perspectives			
3.	Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel	1. Jumlah dokumen pengelolaan anggaran	7 Dokumen
		2. Persentase realisasi anggaran BSN	≥95 %
		3. Frekuensi perputaran Uang Persediaan dalam setahun	11 kali
		4. Persentase Rekonsiliasi ke KPPN yang sesuai dan tepat waktu	100 %
		5. Persentase Laporan Pertanggungjawaban bendahara tepat waktu	100 %
		6. Persentase realisasi target penerimaan PNBP	100 %
Learning and Growth Perspectives			
6.	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKT yang profesional	7. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PKT yang meningkat kompetensinya (Bagian Keuangan)	100%
		8. Realisasi anggaran PKT (Bagian Keuangan)	≥95 %
		9. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola PKT (Bagian Keuangan)	1 Aplikasi

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Biro PKT melaksanakan 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN, melalui kegiatan:

Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN, yang akan menghasilkan output :

- a. Dokumen Perencanaan dan Monitoring Evaluasi,
- b. **Dokumen Pengelolaan Keuangan,**
Dalam rangka menghasilkan output ini, Bagian Keuangan-Biro PKT melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :
 1. Melaksanakan Review Peraturan dan Pedoman serta Sosialisasi
 2. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan
 3. Menyusun Laporan Keuangan BSN
 4. Melaksanakan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 5. Melaksanakan Review dan Sosialisasi Peraturan PNBP
- c. Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara,
- d. Laporan Tata Usaha Perkantoran,
- e. Layanan Perkantoran.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, melalui kegiatan:

Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN, yang akan menghasilkan output Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengembangan Standardisasi.

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Biro PKT berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerja Biro PKT, Bagian Keuangan telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Bagian Keuangan -Biro PKT Tahun 2016.

CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Biro PKT, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Bagian Keuangan-Biro PKT yang direncanakan dalam Tahun 2016 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Bagian Keuangan-Biro PKT Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian %
Customer Perspectives					
I.	Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>	1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP (opini)	WDP (opini)	75%
		3. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan PKT	3,6 (nilai)	3,0	83,3%
Internal Process Perspectives					
II.	Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel	1. Jumlah dokumen pengelolaan anggaran	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
		2. Persentase realisasi anggaran BSN	≥95 %	95,9%	100%
		3. Frekuensi perputaran Uang Persediaan dalam setahun	11 kali	15 kali	136%
		4. Persentase Rekonsiliasi ke KPPN yang sesuai dan tepat waktu	100 %	100%	100%
		5. Persentase Laporan Pertanggungjawaban bendahara tepat waktu	100 %	100%	100%
		6. Persentase realisasi target penerimaan PNB	100 %	132%	132%
Learning and Growth Perspectives					
		10. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PKT yang meningkat kompetensinya (Bagian Keuangan)	100%	100%	100%
		11. Realisasi anggaran PKT (Bagian Keuangan)	≥95 %	99,15%	100%
		12. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola PKT (Bagian Keuangan)	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Bagian Keuangan -Biro PKT untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro PKT.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN I	Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>
----------------------------	---

Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran I

Indikator Kinerja	Capaian 2016			Realisasi 2015	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP (opini)	WDP (opini)	75%	WTP	(25%)
2. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan PKT (Bagian Keuangan)	3,6 (nilai)	3,0 (nilai)	83,3%		

Indikator kinerja dan capaian kinerja untuk mengukur terwujudnya *good governance* dan *clean government* adalah sebagai berikut :

1. **Opini BPK Atas Laporan Keuangan**

Indikator ini adalah indikator yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Utama BSN. Laporan Keuangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Utama BSN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Badan Standardisasi Nasional.

Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bertujuan untuk memberikan kejelasan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Pemeriksaan tersebut dapat menghasilkan opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP, Nilai capaian 100%), Wajar Dengan Pengecualian (WDP,

Nilai capaian 75%), Tidak Wajar (TW, Nilai Capaian 50%), Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer, Nilai Capaian 25%)

Sekretariat Utama BSN menetapkan target mendapatkan opini WTP untuk Laporan Keuangan BSN tahun 2015 karena telah mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan sebanyak 7 (tujuh) kali secara berturut-turut sejak tahun 2009, yaitu untuk Laporan Keuangan BSN tahun 2008 sampai dengan tahun 2014.

Laporan Keuangan BSN Tahun 2015 disusun berdasarkan data/laporan keuangan satuan kerja BSN. Laporan Keuangan BSN tahun 2015 yang dinilai pada tahun 2016 oleh auditor BPK mendapat opini WDP.

2. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan PKT

Bagian Keuangan-Biro PKT sebagai salah satu Bagian di Biro PKT yang memberikan fasilitasi dan layanan kepada internal di lingkungan BSN (selaku pelanggan), dituntut untuk memberikan pelayanan prima sebagai upaya untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas dibebagai sektor, maka spesialisasi dan variasi tuntutan kebutuhanpun semakin meningkat dari pengguna layanan, sehingga Bagian Keuangan-Biro PKT harus dapat mengimbangnya dengan terus melakukan perbaikan dan inovasi.

Untuk mengetahui kualitas layanan perlu dilakukan pengumpulan data dan informasi mengenai kepuasan pegawai terhadap layanan yang diberikan melalui survei dengan menyebarkan kuesioner. Mulai tahun 2016 pelaksanaan survei layanan di lingkup Sekretariat Utama BSN dilakukan bersamaan agar lebih efektif dalam pelaksanaannya.

Bagian Keuangan-Biro PKT pada Tahun 2016 menitikberatkan pertanyaan yang dikaitkan kepada :

1. Kecepatan dan keakuratan Informasi Realisasi.
2. Kecepatan dan keakuratan Proses Penerimaan Negara
3. Percepatan proses pertanggungjawaban keuangan
4. Penyediaan Uang Persediaan yang tepat waktu
5. Penguasaan terhadap masalah dan aturan terkait pelaksanaan Anggaran

SASARAN**II****Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel**

Tabel III.5
Capaian Kinerja Sasaran II

Indikator Kinerja	Capaian 2016			Realisasi 2015	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
1. Jumlah dokumen pengelolaan anggaran	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	0
2. Persentase realisasi anggaran BSN	≥ 95%	95,9%	100%	95,5%	0,4%
3. Frekuensi perputaran Uang Persediaan dalam setahun	11 kali	15 kali	136%	16 kali	(6%)
4. Persentase Rekonsiliasi ke KPPN yang sesuai dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	0
5. Persentase Laporan Pertanggungjawaban bendahara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	0
6. Persentase realisasi target penerimaan PNBPNBP	100%	132%	132%	126,65%	4%

Indikator kinerja dan capaian kinerja untuk mengukur terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang akurat dan akuntabel adalah sebagai berikut :

1. Jumlah dokumen pengelolaan anggaran

Indikator ini adalah indikator yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Utama BSN. Dokumen pengelolaan anggaran terdiri dari:

- a. Laporan Sosialisasi Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran
- b. Laporan Pengelolaan Keuangan
- c. Laporan Keuangan Tahun 2015 Unaudited
- d. Laporan Keuangan Tahun 2015 Audited
- e. Laporan Pengelolaan PNBPNBP
- f. Laporan Review dan Sosialisasi Peraturan PNBPNBP

Selama tahun 2016 tidak ada perubahan aturan pelaksanaan anggaran sehingga tidak dilakukan review. Namun sosialisasi peraturan dan pedoman pelaksanaan anggaran tetap dilaksanakan.

Laporan Keuangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Utama BSN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Badan Standardisasi Nasional.

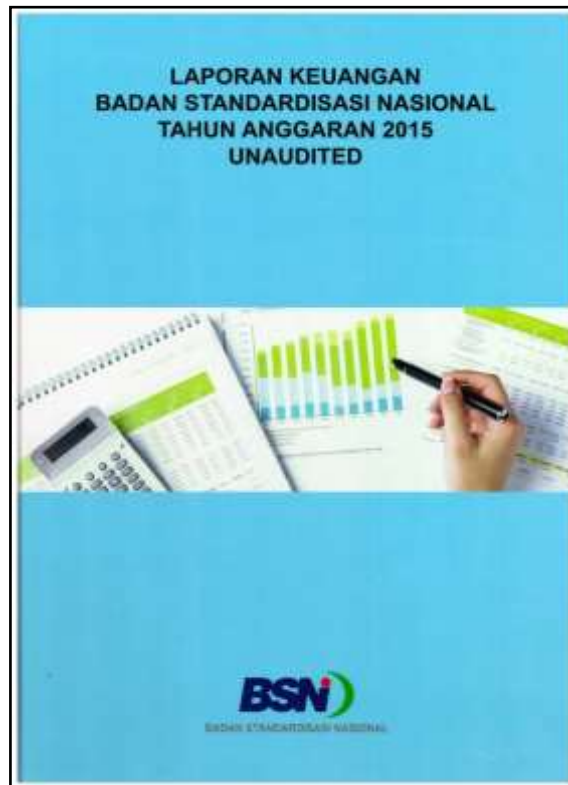
Laporan Keuangan BSN Tahun 2015 disusun berdasarkan data/laporan keuangan satuan kerja BSN. Laporan Keuangan BSN tahun 2015 yang dinilai pada tahun 2016 oleh auditor BPK mendapat opini WDP.

Laporan pengelolaan PNBP adalah laporan yang berisi informasi mengenai penerimaan dan penggunaan PNBP BSN. Laporan ini disusun setiap bulan dan triwulan. Laporan Pengelolaan PNBP Triwulan diserahkan ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Laporan Pengelolaan PNBP bulanan diserahkan ke masing-masing pusat layanan PNBP BSN.

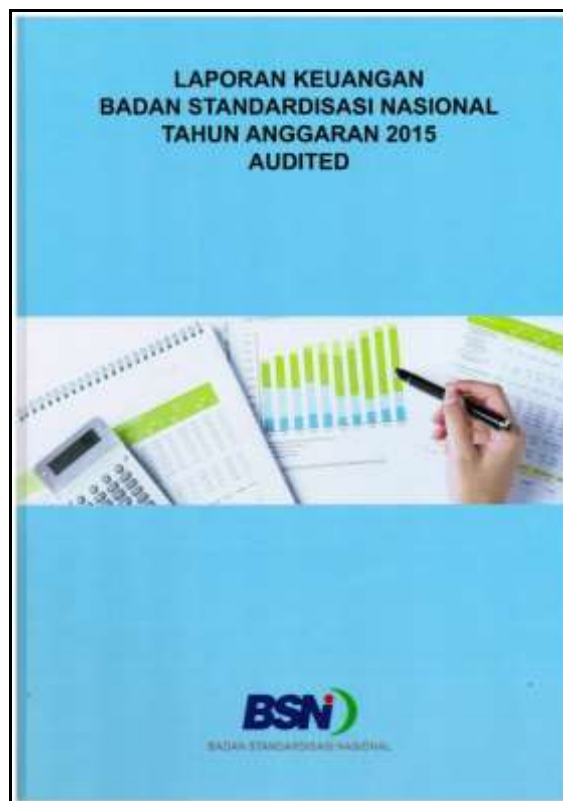
Pada tahun 2016, BSN mengajukan revisi atas PP Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Kementerian Keuangan yang selama ini menggunakan PP No. 62 Tahun 2017. Pertimbangannya adalah karena PP yang lama telah berlaku selama 8 (delapan) tahun, serta mempertimbangkan peningkatan mutu layanan dan perkembangan tuntutan layanan dari masyarakat di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Revisi yang dilakukan terutama terkait dengan nomenklatur jenis layanan dan perubahan besaran tarif.

Draft PP PNBP yang baru tersebut telah melalui pembahasan di tingkat Panitia Antar Kementerian (PAK) dan Harmonisasi yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Setneg, Kementerian Kumham, BSN, Kemenristekdikti, dan kementerian terkait lainnya. Saat ini draft PP tersebut tengah diproses untuk penyelesaian akhir di Kementerian Keuangan untuk selanjutnya diajukan ke Kementerian Setneg agar ditetapkan oleh Presiden.

Sosialisasi Peraturan PNBP dilaksanakan di Bandung pada tanggal 9 Agustus 2016. Sosialisasi Peraturan PNBP menjelaskan mengenai Rancangan PP Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak BSN. Review Peraturan BSN dilakukan atas Peraturan Kepala No. 12 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak BSN.



Gambar 3.1 Laporan Keuangan BSN Tahun 2015 Unaudited



Gambar 3.2 Laporan Keuangan BSN Tahun 2015 Audited



Gambar 3.3 Sosialisasi RPP PNBP Jenis dan Tari

2. Persentase realisasi anggaran BSN

Pada tahun 2016 Badan Standardisasi Nasional mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 126.178.139.000,-. Pagu tersebut dikelola oleh 5 (lima) orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pengelolaannya dibagi dalam tiap-tiap unit eselon I (kecuali Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi yang memiliki 2 (dua) orang PPK). Dalam pelaksanaannya BSN telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 119.816.128.032,- atau sebesar 95,9%.

Dalam hal ini terjadi kenaikan persentase realisasi anggaran jika dibandingkan dengan tahun 2015. Dimana pada Tahun 2015 persentase realisasi anggaran BSN mencapai 95,5% dari total pagu anggaran sebesar Rp 164.811.970.000,-. Artinya terdapat kenaikan sebesar 0,4% dari sisi persentase realisasi anggaran.

3. Frekuensi perputaran Uang Persediaan dalam setahun

Badan Standardisasi Nasional memiliki satu Satker yang dikelola oleh satu orang Bendahara Pengeluaran dengan dibantu oleh 5 orang Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Frekuensi perputaran Uang Persediaan ini berbeda dari tiap BPP, namun secara rata-rata mencapai 15 kali selama tahun 2016. Sehingga persentase realisasi frekuensi perputaran uang persediaan ini mencapai 136% dari target 11 kali.

Dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi penurunan perputaran uang persediaan. Pada tahun 2015 rata-rata frekuensi perputaran uang persediaan sebanyak 16 kali. Terjadi penurunan sebesar rata-rata 1 kali (6%) dibanding tahun 2016. Hal ini disebabkan karena adanya pemotongan anggaran pada tahun anggaran 2016.

4. Persentase Rekonsiliasi ke KPPN yang sesuai dan tepat waktu

Batas waktu Rekonsiliasi Pendapatan Belanja Negara yaitu tanggal 10 setiap bulannya. Rekonsiliasi ini dilakukan dengan KPPN Jakarta IV melalui aplikasi e-rekon. Aplikasi ini baru mulai digunakan pada bulan Mei 2016. Dengan adanya aplikasi ini memudahkan proses rekonsiliasi yang selama ini dilakukan secara manual.

BSN telah melakukan Rekonsiliasi Pendapatan Belanja Negara setiap bulannya tepat waktu. Sehingga target persentase rekonsiliasi 100% dapat tercapai di tahun 2016.

5. Persentase Laporan Pertanggungjawaban bendahara tepat waktu

Laporan Pertanggungjawaban bendahara harus diserahkan ke KPPN Jakarta IV setiap tanggal 10 tiap bulannya. Selama tahun 2016 Laporan Pertanggungjawaban ini dapat diserahkan tepat waktu sehingga tidak terjadi

keterlambatan. Umumnya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara diserahkan ke KPPN pada minggu pertama bulan berikutnya.

Oleh karena itu, target persentase Laporan Pertanggungjawaban bendahara tepat waktu sebesar 100% dapat tercapai pada tahun 2016.

6. Persentase realisasi target penerimaan PNB

Penyusunan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan setiap awal tahun sesuai surat edaran permintaan dari Kementerian Keuangan untuk Pagu Indikatif dan Pagu Sementara. Target PNBP merupakan hasil perhitungan atau penetapan PNBP yang diperkirakan akan diterima 1 (satu) tahun yang akan datang oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L). Kementerian Keuangan telah menyiapkan aplikasi TRPNBP untuk digunakan BSN dalam menginput usulan target PNBP yang selanjutnya disampaikan kepada DJA – Kementerian Keuangan bersama dengan proposal target dan pagu PNBP BSN.

Pada tahun 2016 target PNBP Badan Standardisasi Nasional sebesar Rp 14.115.808.000,-. Pencapaian penerimaan PNBP mencapai Rp 18.618.127.862,- dengan persentase mencapai 132%. Hal ini merupakan pencapaian yang melampaui target sebesar 100%.

**SASARAN
III****Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKT yang profesional****Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran III**

Indikator Kinerja	Capaian 2016			Realisasi 2015	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
1. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PKT yang meningkat kompetensinya (Bagian Keuangan)	100%	100%	100%	0	100%
2. Realisasi anggaran PKT (Bagian Keuangan)	≥95%	99,15%	100%	98,52%	0,63%
3. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola PKT (Bagian Keuangan)	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	0	100%

Indikator kinerja dan capaian kinerja untuk mengukur meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKT yang profesional adalah sebagai berikut :

1. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PKT (Bagian Keuangan) yang meningkat kompetensinya

Dalam rangka peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), Bagian Keuangan-Biro PKT telah mengikutsertakan beberapa pengelola keuangan dalam Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran APBN yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan. Adapun materi yang diberikan dalam pelatihan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara
- b. Pengelolaan Uang Persediaan
- c. Perpajakan Bendahara Pengeluaran
- d. Pengujian dan Pembayaran Tagihan
- e. Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

- f. Aplikasi Bendahara Pengeluaran
- g. Pengelolaan Keuangan Negara



Gambar 3.2. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran APBN

2. Realisasi anggaran PKT (Bagian Keuangan)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2016, Bagian Keuangan-Biro PKT didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016. Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2016 tanggal 7 Desember 2016, pagu anggaran Bagian Keuangan-Biro PKT setelah beberapa kali mengalami perubahan adalah sebesar Rp.2.056.272.000,-.

Realisasi anggaran Bagian Keuangan-Biro PKT Tahun 2016 adalah sebesar Rp.2.038.698.374,- atau sebesar 99,15%. Ini berarti capaian kinerja adalah sebesar 100% dari yang ditargetkan yaitu $\geq 95\%$. Walaupun pencapaian kinerja 100%, tetapi masih perlu dilakukan perbaikan di tahun anggaran 2017 agar pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis dan memungkinkan untuk dilakukan lebih awal dapat dilaksanakan maksimal pada triwulan III pada tahun berjalan.

Pagu dan realisasi anggaran Bagian Keuangan-Biro PKT Tahun 2016 per komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.9
Realisasi Anggaran

Bagian Keuangan-Biro PKT TA. 2016

Kode	Output/Komponen	2016 (dalam rupiah)		%
		Pagu	Realisasi	
3550.002	Dokumen Pengelolaan Keuangan			
051	Mereviu Peraturan, Pedoman dan Sosialisasi	67.860.000	63.732.000	93,92%
052	Mengelola Keuangan	1.333.558.000	1.330.873.474	99,80%
053	Menyusun Laporan Keuangan Badan Standardisasi Nasional	246.326.000	242.784.900	98,56%
054	Mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	128.148.000	127.423.000	99,43%
055	Mereviu dan melakukan sosialisasi peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	280.380.000	273.885.000	97,68%
	Jumlah	2.056.272.000	2.038.698.374	99,15%

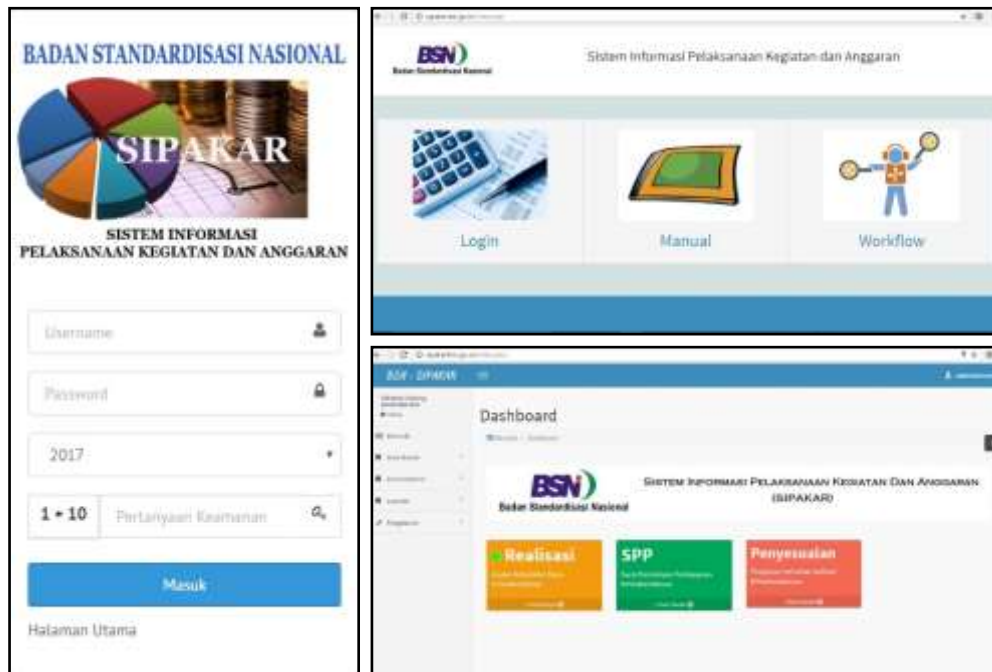


Gambar III.20
Realisasi Anggaran Bagian Keuangan-Biro PKT

3. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola PKT (Bagian Keuangan)

Dalam mendukung tata kelola keuangan di BSN, Bagian Keuangan-Biro PKT mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran (SIPAKAR). Aplikasi SIPAKAR ini merupakan sebuah sistem yang dimulai dari pengajuan kebutuhan dana sampai dengan pertanggungjawaban realisasi anggaran. Pengajuan kebutuhan dana dibuat oleh eselon 3 sebagai

pelaksana kegiatan dan disetujui oleh eselon 2 sebagai penanggung jawab kegiatan, usulan kebutuhan dana ini diproses di bagian keuangan secara web base application.



Gambar 3.3 Aplikasi SIPAKAR

PENUTUP

Laporan Kinerja Bagian Keuangan-Biro PKT Tahun 2016 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bagian Keuangan-Biro PKT Tahun 2016 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Biro PKT.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bagian Keuangan-Biro PKT Tahun 2016, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja telah dapat diselesaikan dari target yang ditetapkan. Terlaksananya seluruh kegiatan di Bagian Keuangan-Biro PKT sangat mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi lingkup Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha, sesuai tugas fungsi Biro PKT sebagai fasilitasi dan koordinasi lingkup Badan Standardisasi Nasional.

Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dan sebagian kecil kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan input untuk perbaikan kegiatan Bagian Keuangan-Biro PKT di tahun-tahun berikutnya.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA BIRO PKT TAHUN 2016



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Beni Nugraha
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Puji Winarni
Jabatan : Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Puji Winarni

Jakarta, Maret 2016
Pihak Pertama

M. Beni Nugraha

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN DAN TATA USAHA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Customer Perspectives		
1 Terwujudnya good governance dan clean government	1 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	70 Nilai (BB)
	2 Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP Opini
	3 Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan PKT	3,6 Nilai
Internal Process Perspectives		
2 Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang akurat dan akuntabel	4 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	5 Dokumen
	5 Persentase pengajuan anggaran BSN yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif	80 %
	6 Persentase penyusunan anggaran Unit Kerja yang telah Berbasis Kinerja	100 %
	7 Persentase Unit Kerja yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	50 %
	8 Jumlah revisi anggaran ke Kemenkeu	maks. 4 Kali
	9 Persentase pelaporan kinerja dan anggaran tepat waktu	100 %
3 Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel	10 Jumlah dokumen pengelolaan anggaran	7 Dokumen
	11 Persentase realisasi anggaran BSN	≥95 %
	12 Frekuensi perputaran Uang Persediaan dalam setahun	11 kali
	13 Persentase Rekonsiliasi ke KPPN yang sesuai dan tepat waktu	100 %
	14 Persentase Laporan Pertanggungjawaban bendahara tepat waktu	100 %
	15 Persentase realisasi target penerimaan PNB	100 %

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4 Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga	16 Jumlah dokumen Tata Usaha dan Rumah Tangga	3 Dokumen
	17 Persentase BMN fisik yang dapat ditelusur	0 %
5 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana BSN	18 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN	100 %
	19 Persentase pembangunan dan ketersediaan fasilitas Lab. Acuan (perencanaan, pembangunan, penyediaan fas lab.)	40 %
	20 Persentase penyelesaian paket pekerjaan yang di lelang	100 %
Learning and Growth Perspectives		
6 Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKT yang profesional	21 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PKT yang meningkat kompetensinya	100 %
	22 Realisasi anggaran PKT	≥95 %
	23 Jumlah <i>e-governance</i> yang mendukung tata kelola PKT	4 Aplikasi

Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1 Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN	67,392,278,000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN	106,500,000,000
Jumlah	173,892,278,000

Pihak Kedua



Puji Winarni

Jakarta, Maret 2016
Pihak Pertama



M. Beni Nugraha

**SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)
KEPALA BAGIAN KEUANGAN TAHUN 2016**